



Pengaruh kompetensi dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan pada kelurahan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya

Axl Christopher Djamiraga¹, Tituk Diah Widajantie²

^{1,2}UPN "Veteran" Jawa Timur

¹18013010054@student.upnjatim.ac.id, ²tituk.widajantie.ak@upnjatim.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 2 April 2022

Disetujui 9 Juni 2022

Diterbitkan 25 Juni 2022

Kata kunci:

Kompetensi; Transparansi; Efektivitas; Pengelolaan dana kelurahan; Surabaya

Keywords :

Competency; Transparency; Effectiveness; Village fund management; Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan pengaruh variabel kompetensi dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Dalam penelitian ini digunakan metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* serta jenis data dalam penelitian ini merupakan data primer. Sampel penelitian ini sebanyak 30 orang pegawai di 6 kelurahan pada Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penyebaran kuesioner atau angket kepada responden. Teknis analisis dan uji hipotesis menggunakan alat *Partial Least Square (PLS)* dengan memakai software aplikasi SmartPLS 3.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan, begitu juga dengan transparansi yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana kelurahan.

ABSTRACT

This study aims to test and prove the effect of competence and transparency on the effectiveness of village fund management in Gubeng District, Surabaya City. This research uses quantitative methods. The sampling technique used is purposive sampling and the type of data in this study is primary data. The sample of this study was 30 employees in 6 villages in Gubeng District, Surabaya City. The data collection technique used in this study was through the distribution of questionnaires or questionnaires to respondents. Technical analysis and hypothesis testing using Partial Least Square (PLS) with SmartPLS 3.0 application software. The results of this study indicate that the competence of the apparatus has a positive and significant effect on the effectiveness of village fund management, as well as transparency which has a positive and significant impact on the management of village funds.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Kelurahan yaitu sebuah bagian dari wilayah Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dibentuk melalui Peraturan Daerah kabupaten/kota menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan dipimpin oleh lurah untuk menjalankan fungsinya yang diberikan camat yang diantaranya memberdayakan dan melayani masyarakat, memelihara ketertiban umum, serta memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum (Peraturan Pemerintah, 2018).

Kelurahan dituntut agar mempunyai kemampuan untuk mengelola tata pemerintahannya dan beroperasi secara mandiri dalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di wilayahnya.

Salah satu kebijakan RPJMN 2020-2024 untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi yaitu dengan meningkatkan porsi Transfer ke Daerah. Untuk mencapai target kebijakan tersebut maka anggaran dana desa dan kelurahan dimungkinkan untuk mengalami peningkatan. Naiknya anggaran tersebut menekankan perlunya pengelolaan keuangan yang baik.

Pengelolaan keuangan di tingkat kelurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kelurahan. Pengelolaan keuangan kelurahan yang baik dilaksanakan dengan tertib dan taat pada ketentuan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif. Ekonomis berarti setiap input yang dibutuhkan oleh sebuah rencana kegiatan harus dibeli dengan biaya terendah, efisien berarti setiap input

dialokasikan sedemikian rupa, sehingga output dapat diproduksi dengan biaya terendah. Efektif diartikan bahwa output yang dihasilkan harus sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Dalam pengelolaan dana kelurahan, dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kaitannya untuk menghindari penyelewengan dana kelurahan, yang dalam mengelola dana tersebut harus ada pertanggungjawaban atas kebijakan dan program yang telah dilaksanakan. Tata pemerintahan yang baik juga diartikan sebagai proses transparan di mana tujuan pemerintah ditetapkan, dicapai, dan program serta kinerjanya dievaluasi. (Agustiniingsih et al., 2020).

Dalam kenyataannya, *Indoneisa Corruption Watch* (ICW) menyatakan bahwa anggaran dana daerah di desa menjadi dana yang paling rawan dikorupsi pada semester I 2021 dimana pemerintah desa menjadi pelaku kasus korupsi paling besar. Peneliti ICW, Lalola Easter menyatakan bahwa terdapat 62 kasus korupsi yang dilakukan pada periode tersebut. Faktor penyebab korupsi tersebut diantaranya karena terbatasnya kompetensi kepala dan perangkatnya serta kurangnya keterlibatan dan pengetahuan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Adanya korupsi menunjukkan bahwa *good governance* belum terwujud dengan baik sepenuhnya.

Salah satu karakteristik atau komponen penting dalam *good governance* yaitu transparansi. Transparansi berupa keterbukaan pemerintah untuk membagikan informasi yang relevan berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi (Mardiasmo, 2018). Transparansi diperlukan masyarakat untuk mengawasi secara langsung terhadap kegiatan yang dilakukan pemerintah. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dapat menciptakan kepercayaan dan akuntabilitas horizontal sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Dalam mewujudkan transparansi maka diperlukan kompetensi aparatur. Kompetensi adalah kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan berbagai tugas dalam suatu profesi dan ditunjukkan oleh dua faktor yaitu kapabilitas dalam intelektual dan juga fisik. (Robbins SP, 2007). Kompetensi dapat mendorong aparatur desa ataupun kelurahan dalam memahami tata kelola pemerintahan yang baik. Jika aparatur tidak dapat memahami hal ini maka akan memengaruhi terhadap kesalahan dalam laporan keuangan yang disusun dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat memengaruhi pada keputusan yang akan diambil berikutnya dan informasi yang didapat oleh masyarakat tidak akurat. Apabila kompetensi aparatur sudah baik maka transparansi dapat tercapai.

Permasalahan lainnya yang terjadi pada kelurahan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya yaitu kurangnya kompetensi dan pengetahuan aparatur pemerintah dalam menggunakan sistem informasi akuntansi sehingga jalannya pengelolaan dana di beberapa kelurahan kurang berjalan dengan lancar dan efektif.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan pengaruh kompetensi aparatur dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan pada kelurahan di Kecamatan Gubeng. Dengan adanya pandemi Covid-19 di Indonesia membuat peneliti memilih lokasi yang paling dekat dengan tempat tinggal peneliti yaitu di wilayah Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Motivasi lain penulis adalah masih sedikit penelitian tentang pengelolaan dana daerah di Surabaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh pegawai yang bekerja di 6 (enam) Kelurahan sebanyak 45 pegawai dalam Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan karakteristik dalam populasi yang memiliki hubungan dominan sehingga dapat mencapai tujuan penelitian yaitu Lurah, Sekretaris, Bendahara, dan 2 orang PPTK sebagai sampel dengan jumlah 5 orang di 6 kelurahan sebanyak 30 orang. Data primer adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dan didapat langsung oleh peneliti dengan menyebarkan kuesioner kepada staf kantor masing-masing kelurahan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan alat *Smart Partial Least Square* (PLS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Responden

Berikut merupakan data deskripsi kuesioner responden pada penelitian ini :

Tabel 1 Deskripsi Kuesioner Responden

Keterangan	Frekuensi	Presentase
Kuesiner disebar	30	100%
Kuesioner kembali	30	100%
Kuesioner tidak kembali	0	0
Kuesioner memenuhi syarat	30	100%
Kuesioner tidak memenuhi syarat	0	0

Sumber : Data Diolah Peneliti (2022)

Tabel 1 menunjukkan bahwa kuesioner yang dibagikan kepada responden sebanyak 30 kuesioner dan seluruh pegawai mengembalikan kuisoner sesuai yang telah diserahkan. Dalam survei ini, profil responden diurutkan berdasarkan jumlah responden, jenis kelamin, umur, jabatan, pendidikan terakhir, dan lama menjabat.

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut ini adalah spesifikasi responden menurut jenis kelamin perangkat kelurahan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya:

Tabel 2 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1.	Laki-Laki	16	53%
2.	Perempuan	14	47%
	Total	30	100%

Sumber : Data Diolah Peneliti (2022)

Tabel 2 mengindikasikan sebagian besar responden adalah laki-laki yaitu sebanyak 16 orang dengan persentase 53% dan sisanya adalah perempuan sebanyak 14 orang dengan persentase sebesar 47%.

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Berikut ini adalah spesifikasi responden menurut umur perangkat kelurahan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya:

Tabel 3 Distribusi Responden Berdasarkan Umur

No.	Umur	Jumlah	Presentase
1.	<30 tahun	1	3%
2.	30-40 tahun	1	3%
3.	41-50 tahun	12	40%
4.	>50 tahun	16	53%
	Total	30	100%

Sumber : Data Diolah Peneliti (2022)

Tabel 3 memperlihatkan bahwa karakteristik responden berdasarkan usia lebih banyak didominasi oleh usia >50 tahun. dengan jumlah 16 orang (53%), sedangkan sisanya responden yang berusia <30 tahun dan yang berusia 30-40 tahun sebanyak 1 orang (3%), dan responden yang memiliki usia 41-50 tahun sebanyak 12 orang (40%)

Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Berikut ini adalah spesifikasi responden menurut perangkat kelurahan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya:

Tabel 4 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Jabatan

No.	Jenis Jabatan	Jumlah	Presentase
1.	Lurah	6	20%
2.	Sekretaris	6	20%
3.	Bendahara	6	20%
4.	PPTK	12	40%
	Total	30	100%

Sumber : Data Diolah Peneliti (2022)

Tabel 4 menjelaskan bahwa sebagian besar jabatan responden adalah sebagai PPTK dengan jumlah 12 orang (40%). Responden yang menjabat lurah, sekretaris dan bendahara masing-masing berjumlah 6 orang (20%).

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berikut adalah spesifikasi responden menurut tingkat pendidikan perangkat kelurahan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya:

Tabel 5 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1.	SMA	2	7%
2.	Diploma	1	3%
3.	S1	16	53%
4.	S2	11	37%
	Total	30	100%

Sumber : Data Diolah Peneliti (2022)

Tabel 5 menunjukkan bahwa mayoritas berpendidikan terakhir S1 dengan jumlah 16 orang (53), sedangkan responden yang berijazah SMA sejumlah 2 orang (7%), responden berpendidikan Diploma sebanyak 1 orang (3%) dan sebanyak 11 orang (37%) berpendidikan S2.

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjabat

Berikut adalah spesifikasi responden menurut lama menjabat perangkat kelurahan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya:

Tabel 6 Distribusi Responden Berdasarkan Lama Menjabat

No.	Lama Menjabat	Jumlah	Presentase
1.	<1 tahun	10	33,3%
2.	1-5 tahun	16	53,3%
3.	6-10 tahun	1	3,3%
4.	>10 tahun	3	10%
	Total	30	100%

Sumber : Data Diolah Peneliti (2022)

Tabel 6 menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat desa menjabat selama 1-5 tahun dengan jumlah 16 orang (53,3%), sedangkan sisanya menjabat selama <1 tahun, yaitu 10 responden (33,3%), lama menjabat 6-10 tahun sebanyak 1 responden (3,3%) dan yang menjabat selama lebih dari 10 tahun sebanyak 3 orang (10%).

Analisis Data

Pengujian Outer Model

Pengujian *outer model* digunakan untuk mengevaluasi dan mengetahui validitas dan reliabilitas model. Dalam pengujian validitas menggunakan penilaian Validitas Konvergen dan *Discriminant Validity*. *Composite Reliability* digunakan dalam pengujian reliabilitas.

Uji Validitas Data

Validitas Konvergen

Validitas Konvergen adalah model pengukuran yang dinilai berdasarkan korelasi antar indeks dengan reflektif indikator. Validasi pada PLS dapat dilihat pada nilai *loading factor*. jika nilai loading factor lebih besar dari 0,7 dikatakan valid dan juga nilai *Average Variance Extracted* atau AVE lebih besar dari pada 0,5.

Tabel 7 Hasil Outer Loading

	Kompetensi	Transparansi	Pengelolaan Dana Kelurahan
X1.1	0.872		
X1.2	0.916		
X1.3	0.936		
X1.4	0.953		
X1.5	0.947		
X2.1		0.905	
X2.2		0.901	
X2.3		0.833	
X2.4		0.915	
X2.5		0.778	
Y1			0.925
Y2			0.893
Y3			0.938
Y4			0.851

Sumber : Output SmartPLS (2022)

Tabel 7 *outer loading* tahap ke satu menunjukkan bahwa semua indikator telah valid. Nilai *loading factor* berada di atas 0,7 menunjukkan bahwa indikator tersebut dinyatakan valid yang ditunjukkan pada tabel 7.

Pengujian validitas konvergensi berikutnya adalah pemeriksaan keluaran AVE. Konstruk memiliki nilai konvergensi yang baik jika nilai AVE lebih besar dari 0,5. Hasil Pengujian AVE yaitu sebagai berikut:

Tabel 8 Nilai AVE

Variabel	AVE
Kompetensi (X1)	0.856
Transparansi (X2)	0.754
Pengelolaan Dana Kelurahan (Y)	0.814

Sumber : Output SmartPLS (2022)

Berdasarkan tabel 8 semua konstruk memiliki nilai AVE lebih dari 0,5 sehingga dapat disimpulkan memenuhi kriteria valid.

Uji Validitas Diskriminan

Discriminant validity dilakukan pada penelitian dengan melihat nilai cross loading pengukuran konstruk. Jika dari setiap indikator memiliki nilai cross loading yang paling besar dibandingkan dengan nilai cross loading yang lain maka *discriminant validity* dapat dikatakan baik. Hasil pengujian *discriminant validity* ini ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 9 Hasil Pengujian Validitas Diskriminan

	Kompetensi	Transparansi	Pengelolaan Dana Kelurahan
X1.1	(0.872)	0.323	0.534
X1.2	(0.916)	0.358	0.581
X1.3	(0.936)	0.411	0.545

	Kompetensi	Transparansi	Pengelolaan Dana Kelurahan
X1.4	(0.953)	0.389	0.679
X1.5	(0.947)	0.427	0.748
X2.1	0.430	(0.905)	0.595
X2.2	0.246	(0.901)	0.567
X2.3	0.107	(0.833)	0.508
X2.4	0.643	(0.915)	0.703
X2.5	0.285	(0.778)	0.613
Y1	0.529	0.668	(0.925)
Y2	0.837	0.610	(0.893)
Y3	0.602	0.622	(0.938)
Y4	0.407	0.615	(0.851)

Sumber : Output SmartPLS (2022)

Berdasarkan tabel 9, terlihat bahwa semua indikator mempunyai nilai *loading* paling besar untuk variabel yang dibentuknya serta tidak ada variabel lain sehingga memenuhi kriteria validitas diskriminan.

Uji Reliabilitas

Pada uji reliabilitas ini menggunakan teknik *composite reliability* dimana suatu variabel jika nilai koefisien reliabilitasnya telah mencapai atau lebih tinggi dari nilai 0,7 maka dapat dinyatakan valid. Hasil pengujian *composite reliability* yaitu pada tabel sebagai berikut.

Tabel 10 Composite Reliability Coefficient

	<i>Composite Reliability</i>	Keterangan
Kompetensi	0.967	Reliabel
Transparansi	0.938	Reliabel
Pengelolaan Dana Kelurahan	0.946	Reliabel

Sumber : Output SmartPLS (2022)

Berdasarkan tabel 10 terlihat nilai *composite reliability* untuk tiap variabel lebih besar melebihi angka 0,7 sehingga disimpulkan bahwa seluruh variabel memenuhi syarat kriteria uji reliabilitas dan dapat dikatakan reliabel.

Pengujian Model Struktural

Dilakukannya pengujian *inner model* atau model struktural yaitu menilai signifikansi, hubungan antar konstruk serta R-square nya pada model penelitian. R-square pada inner model (model structural) ini digunakan untuk mengevaluasi konstruk dependen. Berikut merupakan hasil pengujian R-square pada tabel 11:

Tabel 11 R-Square

	<i>R Square</i>
Pengelolaan Dana Kelurahan	0.666

Sumber : Output SmartPLS (2022)

Berdasarkan tabel 11, nilai 0,666 mengindikasikan bahwa variabel dependen yaitu Pengelolaan Dana Kelurahan (Y) dapat di jelaskan oleh variabel kompetensi (X1) dan transparansi (X2) dengan angka 66,6%. 33,4% sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diujikan pada penelitian ini.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan memperhatikan nilai signifikansi antar konstruk, t-statistic serta p-values. Suatu hipotesis diterima yaitu jika nilai T-Statistic lebih dari 1,96 dengan tingkat signifikan P-Values kurang dari 0,05. Sedangkan hipotesis yang ditolak atau tidak diterima adalah jika nilai T-Statistic kurang dari 1,96 dengan nilai P-Values lebih dari 0,05. Pengujian hipotesis pada penelitian ini dibantu dengan menggunakan software aplikasi smart PLS 3.0 Nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari hasil bootstrapping.

Tabel 12 Path Coefficient

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics (O/STDEV)</i>	<i>P Value</i>
Kompetensi -> Pengelolaan Dana Kelurahan	0.469	0.157	2.992	0.003
Transparansi -> Pengelolaan Dana Kelurahan	0.498	0.205	2.430	0.015

Sumber : Output SmartPLS (2022)

Kompetensi Berpengaruh Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan

Menurut hasil pengujian pada tabel 12 didapat nilai koefisien beta kompetensi terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan yaitu 0,469 dengan T-statistik 2,992 yang lebih besar dari 1,96. Nilai P-Value yaitu 0,003 lebih kecil dari 0,05. Bersumber pada hasil tersebut, terlihat T-statistik dan P-value signifikan. Hal ini menunjukkan H_1 diterima bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana kelurahan.

Transparansi Berpengaruh Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan

Bersumber hasil pengujian pada tabel 12 didapat nilai koefisien beta transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan yaitu 0,498 dengan T-statistik 2,430 yang lebih besar dari 1,96. Nilai P-Value yaitu 0,015 lebih kecil dari 0,05. Bersumber pada hasil tersebut, terlihat T-statistik dan P-value signifikan. Hal ini menunjukkan H_2 diterima bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana kelurahan.

Pembahasan

Hasil penelitian membuktikan bahwa kompetensi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan. Artinya, semakin tingginya kompetensi aparatur, maka efektivitas pengelolaan dana kelurahan juga semakin tinggi. Dengan kata lain, kompetensi diperlukan agar penyusunan laporan keuangan terselenggara dengan baik, transparan dan akuntabel sehingga dapat mengurangi dan mencegah kesalahan. Adanya aparatur yang berkompeten dapat mendorong dan mendukung pencapaian tujuan pengelolaan dana kelurahan dengan lebih baik dan efektif.

Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Larastika Medianti (2018), Luh Putri, dkk (2021), dan Ni Luh Putu, Ni Wayan Alit (2021) yang menyatakan kompetensi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa dalam hal ini kelurahan.

Hasil penelitian membuktikan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat transparansi maka akan meningkatkan efektivitas pengelolaan dana kelurahan. Keterbukaan informasi kepada masyarakat akan menciptakan hubungan positif antara masyarakat dan instansi kelurahan dalam bersama-sama mengelola keuangan kelurahan dengan baik.

Hasil ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan Anita Firdaus, dkk (2019), dan Ni Luh Putu, Ni Wayan Alit (2021) yang menyatakan transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan dana desa dalam hal ini kelurahan.

Sebaliknya, hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitri dan Alfi Nurfitriani (2019) yang menyatakan transparansi tidak ada pengaruhnya terhadap pengelolaan dana desa dalam hal ini kelurahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan mengenai pengaruh kompetensi dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan pada kelurahan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana kelurahan. Artinya, semakin tingginya kompetensi aparatur, maka efektifitas pengelolaan dana kelurahan juga semakin tinggi.

Variabel Transparansi juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana kelurahan. Artinya, semakin semakin tinggi tingkat transparansi maka akan meningkatkan efektifitas pengelolaan dana kelurahan. Keterbukaan informasi kepada masyarakat akan menciptakan hubungan positif antara masyarakat dan instansi kelurahan dalam bersama-sama mengelola keuangan kelurahan dengan baik dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningih, M., Taufik, T., & Indrawati, N. (2020). Pengaruh Good Governance Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Tambang, Kecamatan Kampar Dan Kecamatan Bangkinang Kota). *Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 80–91.
- Andriani, M. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 1(2), 1–13. <https://doi.org/10.37673/jafa.v1i2.323>
- Firdaus, A., Suharno, & sunarti. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Danadesa Di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(3), 1–10.
- KEMENKOPMK. (2020). *2020, Dana Desa Fokus Pada Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Potensi Ekonomi Desa*. <https://www.kemerkopmk.go.id/2020-dana-desa-fokus-pada-pemberdayaan-masyarakat-dan-pengembangan-potensi-ekonomi-desa>
- Hindrayani, N. L. P., & Wati, N. W. A. E. (2021). Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), 448–460.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Medianti, L. (2018). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variable Pemodesari (Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bayat). *Jom Feb*, 1(Dd)
- Menteri Dalam Negeri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Presiden. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*
- Peraturan Pemerintah. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan*.
- Putri, L., P. P., Ayu, G., Rencana, K., & Dewi, S. (2021). Pengaruh kompetensi, akuntabilitas dan peran pendamping desa terhadap pengelolaan dana desa 1. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(01), 820–829
- Robbins SP, & J. (2017). *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2(1), 52–66.

Waseso, R. (2021). *Dana Desa Tahun Ini Sudah Tersalurkan Rp 50,5 Triliun*. Business Insight. <https://insight.kontan.co.id/news/dana-desa-tahun-ini-sudah-tersalurkan-rp-505-triliun>

Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20. <https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762>